

**PENGARUH TATA KELOLA PEMERINTAHAN, DIGITALISASI,
INTERNAL AUDITOR TERHADAP PENCEGAHAN FRAUD
DIMEDIASI AKUNTABILITAS PUBLIK
(SURVEY DI KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN)**

Noviana Rachmawati Fauzia¹, Harnovinsah²

Universitas Pancasila

Email: novianarf@gmail.com¹, harnovinsah@univpancasila.ac.id²

Abstract – *The Covid-19 pandemic has changed work patterns that mostly rely on information technology. This makes the span of control wider so that Governance, Digitalization, and Internal Auditors to prevent fraud need to be evaluated. This research is quantitative research through surveys with questionnaires and variance-based SEM approach with SmartPLS. The sampling technique used is purposive sampling on the population in the Ministry of Industry as many as 1,054 offices spread throughout Indonesia with the formula Yamane / Isaac and Michael (290 samples). Before hypothesis testing, validity and reliability tests are carried out. This study found that law enforcement against fraudulent behavior in government must be carried out objectively free from the influence of power interests. Furthermore, the Ministry of Industry needs to review the relationship between the implementation of good governance, digitalization and internal auditors in fraud prevention. The novelty in this study is related to the influence of democracy, legal culture, MPN and SPAN in fraud prevention and its impact on public accountability.*

Keywords: *Governance, Digitalization, Internal Auditor, Fraud Prevention, Public Accountability*

Abstrak – Pandemi Covid-19 telah mengubah pola kerja yang sebagian besar mengandalkan teknologi informasi. Hal ini membuat rentang kendali semakin luas sehingga Tata Kelola, Digitalisasi, dan Auditor Internal untuk mencegah terjadinya kecurangan perlu dievaluasi. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif melalui survei dengan kuesioner dan pendekatan SEM berbasis varians dengan SmartPLS. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive sampling pada populasi di Kementerian Perindustrian sebanyak 1.054 kantor yang tersebar di seluruh Indonesia dengan rumus Yamane/Isaac dan Michael (290 sampel). Sebelum dilakukan pengujian hipotesis terlebih dahulu dilakukan uji validitas dan reliabilitas. Kajian ini menemukan bahwa penegakan hukum terhadap perilaku curang dalam pemerintahan harus dilaksanakan secara objektif bebas dari pengaruh kepentingan kekuasaan. Lebih lanjut, Kementerian Perindustrian perlu mengkaji ulang hubungan antara penerapan tata Kelola yang baik, digitalisasi dan auditor internal dalam pencegahan kecurangan. Kebaruan dalam penelitian ini terkait dengan pengaruh demokrasi, budaya hukum, MPN dan SPAN dalam pencegahan kecurangan serta dampaknya terhadap akuntabilitas public.

Kata Kunci: Tata Kelola, Digitalisasi, Auditor Internal, Pencegahan Fraud, Akuntabilitas Publik

PENDAHULUAN

Pandemi Covid – 19 telah mengubah pola kerja yang Sebagian besar mengandalkan teknologi informasi. Hal ini membuat rentang kendali semakin luas sehingga Tata Kelola, Digitalisasi dan Auditor Internal untuk mencegah terjadinya kecurangan perlu dievaluasi. Kecurangan dalam pengelolaan keuangan negara merupakan permasalahan yang masih terjadi hingga saat ini. Reformasi pengelolaan keuangan negara belum sepenuhnya membebaskan pengelolaan keuangan negara dari masalah penyelewengan.

Berdasarkan data yang dipublikasikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dapat diuraikan penanganan kasus penipuan dalam pengelolaan keuangan negara dari Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2022 berdasarkan jenis kasus sebagai berikut :

No	Kasus Penipuan Keuangan Negara dan Pengelolaan	2017	2018	2019	2020	2021
1	Pengadaan barang / jasa	15	16	18	19	31
2	Lisensi	2	3	2	1	1
3	Penyuapan	80	94	169	120	57
4	Koleksi	2	1	5	2	1
5	Penyalahgunaan Anggaran	2	2	1	3	3
6	Kejahatan Pencucian Uang	4	9	7	6	4
7	Menghambat Proses Korupsi Komisi Pemberantasan	1	3	4	1	1
	Jumlah Kasus	106	128	206	152	98

Sumber : KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi, 2022), diolah

Oleh karena itu, Tindakan pencegahan kecurangan penting bagi organisasi karena kecurangan dapat merugikan organisasi baik dari segi sumber dayanya maupun citra organisasi. Baesens (Baesens, 2015, p.10) menyatakan bahwa pencegahan penipuan mengacu pada Tindakan yang dapat diambil untuk menghindari atau mengurangi penipuan.

Selain masalah penyelewengan, terdapat beberapa permasalahan terkait pengelolaan keuangan negara, seperti diungkapkan Ketua BPK Isma Yatun bahwa BPK menemukan 4.094 kasus keuangan dari 5.480 permasalahan yang diperiksa di persidangan (finance.detik.com). Sesuai dengan kajian tematik yang dilakukan BPK RI terhadap kebijakan PC-PEN terhadap 241 obyek, ditemukan bahwa kebijakan tersebut belum mewujudkan efektifitas, transparansi, akuntabilitas, kepatuhan manajemen dan tanggung jawab keuangan (dpr.go.id, 22 juni 2021)

Dalam Manajemen Publik Baru (NPM), transparansi adalah fitur kunci dari NPM. Pollit dan Bouchaert (Pollit dan Bouchaert, 2011, p, 2), menjelaskan bahwa Reformasi Manajemen Publik adalah perubahan struktur dan proses organisasi sektor public dengan tujuan agar organisasi dapat berjalan dengan baik. Sehubungan dengan itu, Reformasi Birokrasi secara massif yang dilaksanakan melalui Tiga Pilar Utama, yaitu Pilar Organisasi, Pilar Proses Bisnis dan Pilar Sumber Daya Manusia.

E-government mengacu pada pelaksanaan pekerjaan yang memanfaatkan teknologi

informasi. Khan (Khan, 2018a, p.2) mendefinisikan digitalisasi system dalam keuangan public sebagai bagian penting dari administrasi public dan pemerintah bertanggung jawab untuk mengembangkan mekanisme e-governance yang efektif. Digitalisasi menurut Lund, White dan Lamb akan memberikan manfaat yang sangat besar bagi organisasi/Perusahaan untuk meminimalisir kecurangan (Gupta et al., 2017b, hlm. 3-4). Sandoval-Alamzan et al., 2017, hlm.3) memperkenalkan kerangka kerja strategis digitalisasi bagi pemerintah berdasarkan strategi tata Kelola digital untuk menciptakan nilai public.

Pada dasarnya auditor internal dituntut untuk tetap independent dalam menjalankan perannya. Menurut Arens (Arens, 2017, hlm 827) dan Louwers, et. Al (Louwers et al., 2018, p.24), auditor internal sebagai kegiatan konsultasi dan assurance yang dilakukan secara independent dan objektif untuk meningkatkan nilai dan operasional organisasi. Seperti yang dijelaskan oleh Anderson (Anderson et al., 2017, p.2.5) bahwa International Professional Practices Framework (IPPF) mencakup pedoman wajib dan pedoman yang direkomendasikan. Apa yang cukup hal penting dalam IPPF selain prinsip dasar dan standar yang menjadi pedoman wajib adalah Kode Etik.

Berdasarkan penjelasan diatas, penelitian ini menggunakan perspektif lain dalam mencegah, mendeteksi dan menangani kecurangan. Hal ini berbeda dengan penelitian sebelumnya dimana kerangka konseptual untuk mendeteksi kecurangan yaitu audit forensic dan audit investigasi (Mamahit dan Urumsah, 2018). Audit adalah Tindakan untuk menentukan bahwa telah terjadi kecurangan dalam pengelolaan keuangan organisasi. Pada dasarnya, penelitian ini lebih menekankan pada Upaya pencegahan dan mitigasi yang mungkin dilakukan untuk meminimalisir terjadinya kecurangan dengan menerapkan tata Kelola yang baik, digitalisasi dan auditor internal.

Penelitian ini mengkaji kembali hubungan antara penerapan tata Kelola yang baik, digitalisasi dan auditor internal dalam pencegahan kecurangan yang dilakukan oleh Martins dan Junior (Martins et al., 2020), Tseng dan Wu (Tseng & Wu, 2016), Sadaf et al (Sadaf et al., 2018), yang menyimpulkan bahwa tata Kelola yang baik berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan.

Berdasarkan latar belakang tersebut dan bertitik tolak pada uraian diatas maka peneliti mengambil judul penelitian tentang Pengaruh Tata Kelola Pemerintahan, Digitalisasi, Internal Auditor Terhadap Pencegahan Fraud Dimediasi Publik Akuntabilitas (Survey Di Kementerian Perindustrian).

METODE PENELITIAN

Analisis Statistik Deskriptif menurut Ferdinand (Ferdinand, 2014), angka indeks digunakan untuk mendapatkan gambaran tentang derajat persepsi responden terhadap variable yang akan diteliti. Skala likert yang digunakan adalah indeks angka 1 untuk jawaban sangat tidak setuju dengan skor tertinggi 5 yang digunakan untuk mencerminkan jawaban yang sangat setuju dengan rumus indeksasi sebagai berikut :

Nilai Indeks = $[(\%F1 \times S1) + (\%F2 \times S2) + (\%F3 \times S3) + (\%F4 \times S4) + (\%F5 \times S5)]/5$
Perhitungan nilai indeks jawaban akan menghasilkan suatu nilai.

- a. Skor minimal diperoleh jika 100% responden menjawab skor 1 : $100\% = 100\%$, sehingga nilai indeks minimum diperoleh $100\% \text{ dibagi } 5 = 20\%$.
- b. Skor maksimal diperoleh jika 100% responden menjawab skor 5 : $5 \times 100\% = 500\%$, jadi nilai indeks maksimum diperoleh sebesar $500\% \text{ dibagi } 5 = 100\%$

Penelitian ini menggunakan pendekatan Structural Equation Model (SEM) dengan software Partial Least Square (PLS) yang disebut software SmartPLS. Pertimbangan penulis menggunakan SmartPLS adalah sebagai berikut :

- a. Penelitian ditujukan untuk menemukan kausalitas antar variable.
- b. Kompleksitas tinggi dalam menentukan model dengan dukungan teoritis yang lemah (penelitian analisis kausal – prediktif).
- c. Tidak ada persyaratan normalitas dan sampel tidak harus besar

Analisis dengan PLS – SEM terdiri dari dua sub model, yaitu pengukuran dan model structural dengan menilai outer model atau model pengukuran di bawahnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Analisis Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif dilakukan dengan menilai kecenderungan jawaban responden terhadap setiap variabel. Hasil analisis statistik deskriptif dapat dijelaskan sebagai berikut.

Variabel pencegahan fraud diukur dengan empat dimensi yaitu budaya kejujuran, etika yang tinggi, tanggung jawab manajemen dan pengawasan Komite Audit dengan indeks persentase 95,79 (interpretasi tinggi). Artinya pimpinan dan anggota organisasi menerapkan budaya kejujuran dan etika yang tinggi dalam menjalankan tugasnya. Selain itu, pengawasan Komite Audit telah meningkatkan level organisasi dalam menerapkan tata kelola, risiko, dan pengendalian serta menindak pelanggaran yang terjadi.

Variabel akuntabilitas publik diukur melalui tiga dimensi dengan persentase dex 96,18 (interpretasi tinggi). Artinya akuntabilitas publik organisasi memiliki kualitas yang baik, perumusan kebijakan yang dilakukan tepat sasaran dan pencegahan kecurangan mampu meningkatkan akuntabilitas publik.

Pengujian Hipotesis

Pada SmartPLS pengujian hipotesis dilakukan melalui Bootstrapping untuk mendapatkan nilai t statistik yang kemudian dibandingkan dengan t tabel. Kriteria pengujian hipotesis dalam penelitian ini adalah taraf signifikansi (α) 5% dan kriteria sebagai berikut: 1) Jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ (1,96) maka hipotesis diterima; dan 2) Jika $t_{hitung} < t_{tabel}$ (1,96) maka hipotesis ditolak.

Sesuai dengan gambar jalur di atas dapat dijelaskan bahwa hasil pengujian hubungan antara konstruk (variabel) dengan dimensi dimana semua dimensi pada variabel penelitian signifikan dalam membentuk konstruk (nilai t_{hitung} lebih besar dari t_{tabel} (1,96). Sedangkan hubungan antara variabel eksogen dan endogen seperti disajikan pada Tabel 14 berikut.

Tabel 1 Hasil Diagram Jalur dan Pengujian

	Hipotesis	P		
Tata Pemerintahan yang Baik -> Pencegahan Penipuan	0,389	5.828	0.000	Penting Pengaruh
Digitalisasi Sistem -> Penipuan Pencegahan	0,135	3.815	0.000	Penting Pengaruh

Peran Auditor Internal ->	0,450	7.151	0.000	Penting
Pencegahan Penipuan				Pengaruh
Pencegahan Penipuan -> Publik	0,866	50.663	0.000	Penting
Akuntabilitas				Pengaruh
Sumber : <i>Keluaran SmartPLS</i> (2022)				

Sesuai dengan Tabel 1: nilai statistik variabel tata kelola sebesar 5,828 atau lebih besar dari t tabel 1,96 ($5,828 > 1,96$) dengan tingkat signifikansi 5% dan P Values sebesar 0,000 ($0,000 < 0,05$).

Hasil uji statistik membuktikan bahwa good government governance memiliki arah yang signifikan dan positif terhadap pencegahan dan penanganan fraud. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik penerapan tata kelola pemerintahan yang baik, maka pencegahan kecurangan akan semakin baik.

Sesuai dengan Tabel 1: nilai t-statistik variabel digitalisasi sistem adalah 3,815 atau lebih besar dari t-tabel 1,96 ($3,815 > 1,96$) dengan tingkat signifikansi 5% dan Nilai P sebesar 0,000 ($0,000 < 0,05$). Hasil uji statistik membuktikan bahwa digitalisasi sistem memiliki arah yang signifikan dan positif terhadap pencegahan kecurangan. Artinya, digitalisasi sistem yang telah diterapkan Kementerian Keuangan melalui MPN dan SPAN dapat mencegah terjadinya kecurangan. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik digitalisasi sistem, semakin baik pencegahan penipuan.

Sesuai dengan Tabel 1: nilai t-statistik variabel peran auditor internal sebesar 7,151 atau lebih besar dari t-tabel 1,96 ($7,151,963 > 1,96$) dengan tingkat signifikansi 5% dan P Values sebesar 0,000 ($0,000 < 0,05$). Hal ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh signifikan peran auditor internal terhadap pencegahan kecurangan.

Nilai koefisien parameter sebesar 0,450 dan arahnya positif yang berarti semakin baik peran auditor internal maka pencegahan kecurangan termasuk penanganan kecurangan dilakukan sesuai dengan ketentuan dan etika profesi, begitu pula sebaliknya.

Sesuai dengan Tabel 1: nilai t-statistik variabel pencegahan kecurangan sebesar 50,663 atau lebih besar dari t-tabel 1,96 ($50,663 < 1,96$) dengan tingkat signifikansi 5% dan Nilai P sebesar 0,000 ($0,000 > 0,05$). Hasil uji statistik membuktikan bahwa pencegahan kecurangan memiliki dampak signifikan dan arah positif terhadap akuntabilitas publik. Dengan demikian, semakin baik pencegahan kecurangan, semakin baik dampaknya terhadap akuntabilitas publik. Program pencegahan fraud dapat digunakan sebagai early warning system terhadap indikasi terjadinya fraud sehingga manajemen dan auditor internal akan mengambil langkah-langkah penting untuk meminimalisir terjadinya fraud lebih lanjut, seperti rekomendasi perbaikan proses bisnis dan memperketat pengawasan agar tidak ada ruang untuk fraud. perilaku. Dengan demikian, akuntabilitas publik akan lebih berkualitas.

Diskusi

Pengaruh Penerapan Good Government Governance terhadap Pencegahan Fraud

Hasil uji statistik membuktikan bahwa good government governance berpengaruh signifikan dan positif terhadap pencegahan dan penanganan fraud. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik penerapan tata kelola pemerintahan yang baik, semakin baik pencegahan kecurangan.

Hasil penelitian ini juga mirip dengan teori keagenan seperti yang ditunjukkan oleh Jensen dan Meckling (Jensen & Meckling, 1976), dimana pelaksanaannya dilakukan berdasarkan kesepakatan Principal (rakyat) dan Agen (pemerintah) secara efektif dan efisien. untuk mencapai tujuan bersama.

Hubungan keagenan yang mendorong komitmen organisasi untuk menerapkan tata kelola yang baik. Komitmen pimpinan dan anggota organisasi terkait kesadaran untuk menerapkan tata kelola yang baik membuat organisasi melakukan perbaikan tata kelola yang transparan, akuntabel, bertanggung jawab, mandiri dan terbuka informasi. Artinya, Agency Theory mendorong organisasi untuk membangun tata kelola dalam pemerintahan seperti sistem informasi keuangan negara, mitigasi ketidakpastian dan risiko di masa depan, dan tata kelola penyampaian berbasis kinerja.

Selain itu, penelitian ini relevan dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik yang bersumber dari KNKG bahwa penerapan GCG di pemerintahan berdasarkan prinsip demokrasi, transparansi, akuntabilitas, budaya hukum, dan budaya hukum dapat meningkatkan efektivitas pencegahan kecurangan.

Selanjutnya, pengujian tersebut juga terkait dengan dimensi transparansi dan akuntabilitas yang mencerminkan organisasi dalam memberikan kinerja dan informasi keuangan kepada pemangku kepentingan. Selain itu, tata kelola yang baik juga mengukur keadilan dan bagaimana kondisi organisasi yang memperlakukan pemangku kepentingan secara adil.

Pengaruh Digitalisasi Sistem Terhadap Pencegahan

Fraud Hasil pengujian statistik membuktikan bahwa digitalisasi sistem berpengaruh signifikan dan positif terhadap pencegahan fraud. Artinya, digitalisasi sistem yang telah diterapkan Kementerian Perindustrian melalui MPN dan SPAN dapat mencegah penipuan. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik digitalisasi sistem, semakin baik pula pencegahan penipuan.

Hasil penelitian ini juga sejalan dengan teori keagenan yang diungkapkan oleh Jensen dan Meckling (Jensen & Meckling, 1976), dimana hubungan keagenan mendorong organisasi untuk membangun dan menerapkan tata kelola yang efektif dan efisien melalui digitalisasi sistem.

Pengaruh Peran Auditor Internal terhadap Pencegahan Fraud

Hasil uji statistik membuktikan bahwa peran auditor internal berpengaruh signifikan dan positif terhadap pencegahan kecurangan. Artinya dengan peran auditor internal yang memadai, pencegahan kecurangan dapat dilakukan secara optimal. Dengan demikian dapat diartikan bahwa semakin baik peran auditor internal maka semakin baik pula pencegahan terjadinya kecurangan, begitu pula sebaliknya.

Hasil penelitian ini juga sejalan dengan teori keagenan yang diungkapkan oleh Jensen dan Meckling (Jensen & Meckling, 1976), dimana hubungan keagenan mendorong organisasi untuk membangun dan menerapkan tata kelola yang efektif dan efisien melalui mitigasi ketidakpastian dan risiko masa depan serta tata kelola. insentif. berdasarkan kinerja yang perlu dipantau secara intensif.

Dampak Pencegahan Fraud terhadap Akuntabilitas Publik Hasil Uji

statistik membuktikan bahwa pencegahan fraud memiliki dampak yang signifikan dan positif terhadap akuntabilitas publik. Dengan demikian, semakin baik pencegahan kecurangan, semakin besar dampaknya terhadap akuntabilitas publik.

Program pencegahan fraud dapat digunakan sebagai early warning system terhadap indikasi terjadinya fraud sehingga manajemen dan auditor internal akan mengambil langkah-langkah penting untuk meminimalisir terjadinya fraud lebih lanjut, seperti merekomendasikan perbaikan proses bisnis dan memperketat pengawasan agar tidak ada ruang lagi. untuk perilaku penipuan. Dengan demikian, akuntabilitas publik akan lebih berkualitas.

KESIMPULAN

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan good government governance berpengaruh signifikan dan positif terhadap pencegahan kecurangan. Komitmen organisasi dan kepemimpinan memiliki peranan penting dalam implementasi tata kelola pemerintahan yang baik karena dengan komitmen tersebut organisasi akan melakukan perbaikan terhadap proses bisnis yang dilakukan dalam menyelesaikan pekerjaan menuju tata kelola yang baik.

Digitalisasi berpengaruh signifikan dan positif terhadap pencegahan fraud. Digitalisasi dapat memangkas birokrasi dalam proses pengelolaan keuangan negara sehingga meminimalisir terjadinya korupsi dan kolusi dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dalam hal pemenuhan hak dan kewajiban kepada negara. Hal ini dikarenakan penerapan otorisasi yang ketat pada digitalisasi sistem dapat dilakukan agar indikasi kecurangan akibat pelanggaran kewenangan dapat dideteksi secara dini.

Peran auditor internal memiliki pengaruh yang signifikan dan positif terhadap pencegahan kecurangan.

Integritas, kerahasiaan, objektivitas, kompetensi, dan otoritas yang memadai dari auditor internal telah berkontribusi dalam pencegahan kecurangan. Hal ini karena pelaksanaan pengawasan untuk mencegah terjadinya kecurangan tidak hanya bergantung pada sumber daya manusia auditor internal dan kode etik profesi, tetapi juga memerlukan landasan yang memberikan kewenangan kepada auditor internal dalam melaksanakan tugas pengawasan di unit-unit pemerintahan.

Pencegahan kecurangan berpengaruh signifikan dan positif terhadap akuntabilitas publik. Hal ini karena jika indikasi kecurangan terdeteksi, manajemen dan auditor internal akan mengambil langkah-langkah penting meminimalkan penipuan lebih lanjut dan menangani penipuan dengan benar. Dengan demikian, akuntabilitas keuangan akan lebih berkualitas.

DAFTAR PUSTAKA

- ADDIN Mendeley Daftar Pustaka CSL_BIBLIOGRAFI Ali, T., Jhandhir, Z., Ahmad, A., Khan, M., Khan, AA, & Choi, GS (2017). Mendeteksi penipuan pelabelan sampel beras menggunakan computer vision dan fuzzy knowledge. *Alat dan Aplikasi Multimedia*, 76(23), 24675–24704. <https://doi.org/10.1007/s11042-017-4472-9>
- Anderson, UL, Ketua, MJ, Ramamoorti, S., Riddle, C., Salamasick, M., & Sobel, PJ (2017). PEMERIKSAAN INTERNAL (Edi Keempat). Yayasan Audit Internal.
- Ali, T., Jhandhir, Z., Ahmad, A., Khan, M., Khan, AA, & Choi, GS (2017). Mendeteksi penipuan pelabelan sampel beras menggunakan computer vision dan fuzzy knowledge. *Alat dan Aplikasi Multimedia*.
- Arens. (2017). *Layanan Audit dan Penjaminan: Suatu Pendekatan Terpadu*.
- Arens, AA, Penatua, RJ, Beasley, MS, Hogan, CE, & Jones, JC (2021). *Audit: Seni dan Ilmu Perikatan Jaminan*. Di Pearson Kanada.

- Asosiasi Pemeriksa Penipuan Bersertifikat (ACFE). (2014). Manual Pemeriksa Kecurangan (Edisi Internasional 2014). 101–149. <https://www.pdfdrive.com/fraud-examiners-manual-international-edition-2014-d189212955.html>
- Baesens, B. (2015). Analisis Penipuan. *Penambangan Data untuk Intelijen, Penipuan & Deteksi Kriminal*, 283– 346. <https://doi.org/10.1201/9781420067248.ch7>
- Biol, B. (2019). Tata Kelola Perusahaan dan Deteksi Penipuan: Studi Dari Bursa Istanbul. *Jurnal Bisnis dan Manajemen Eurasia*, 7(1), 44–64. <https://doi.org/10.15604/ejbm.2019.07.01.005>
- Chowdhury, A., & Chandra, N. (2019). Pengaruh Filosofi Manajemen Publik Baru pada Manajemen Risiko, Pengendalian Penipuan dan Korupsi dan Audit Internal: Bukti dari Australia Organisasi Sektor Publik. *Hubungi yi Informaticy de Gestiune*, 18(4), 486–508. <https://doi.org/10.24818/jamis.2019.04002> Komisi Pemberantasan Korupsi. <https://www.kpk.go.id/id/statistik/penindakan>
- Daliri, S. Perusahaan untuk Abad 21: Perspektif Internasional dan Analisis Kritis. Dalam *Kode Tata Kelola Perusahaan untuk Abad 21: Perspektif Internasional dan Analisis Kritis*. <https://doi.org/10.1007/978-3-319-51868-8>
- Eisenhardt, KM (1989). *Agency Theory : Sebuah Penilaian dan Review*. *Akademi Manajemen*, 14(1) 57-74
- Elbardan, H., & Kholeif, A. (2017). *Perencanaan sumber daya perusahaan, tata kelola perusahaan, dan audit internal*. Di Palgrave Macmillan. <http://www.palgrave.com/gb/book/9783319549897>
- Ferdinand, A. (2014). *Metode Penelitian Manajemen: Pedoman Penelitian untuk Penulisan Skripsi, Tesis, dan Disertasi Ilmu Manajemen (Edisi 5)*. PERS UNIP.
- Gupta, S., Keen, M., & Shah, A. (2017a). *Revolusi Digital dalam Keuangan Publik*. Dalam *Revolusi Digital dalam Keuangan Publik*. <https://doi.org/10.5089/9781484315224.071>
- Gupta, S., Keen, M., & Shah, A. (2017b). *Kutipan: Revolusi Digital dalam Keuangan Publik*. Dalam *Kutipan: Revolusi Digital dalam Keuangan Publik*. <https://doi.org/10.5089/9781484323823.073>
- Habbe, AH, Rasyid, S., Arif, H., & Muda, I. (2019). Mengukur intensi auditor internal untuk meniup peluit (A Quasi-experiment of internal auditors in the local government).
- Ionescu, L. (2017). *Tata Kelola Perusahaan dan Reformasi Akuntansi di Cina*. *Ekonomi, Manajemen, dan Pasar Keuangan*, 12(1), 82. <https://doi.org/10.22381/emfm12120176>
- Jensen, C., & Meckling, H. (1976). *TEORI PERUSAHAAN : PERILAKU MANAJERIAL , AGENBIAYA DAN STRUKTUR KEPEMILIKAN I*. Pendahuluan dan ringkasan Dalam makalah ini WC menggambarkan kemajuan terbaru dalam teori (1) hak milik , perusahaan . Selain mengikat bersama unsur-unsur teori e. 3, 305–360.
- Khan, HA (2018). *Globalisasi dan Tantangan Administrasi Publik*. Dalam *Globalisasi dan Tantangan Administrasi Publik*. <https://doi.org/10.1007/978-3-319-69587-7>
- KNKG. (2006). *Pedoman Umum Tata Kelola Perusahaan yang Baik Indonesia*. Komite Nasional Kebijakan Pemerintahan. (2008). *Pedoman 2008*. 3. <http://www.knkgindonesia.org/dokumen/Pedoman-Pelaporan-Pelanggaran-Whistleblowing-System-WBS.pdf>
- Leavy, P. (2017). *Rancangan Penelitian: Pendekatan Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Campuran, Berbasis Kesenian, dan Partisipatif Berbasis Masyarakat*. Di *BMC Kesehatan Masyarakat*.
- Lembaga Administrasi Negara dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan RI (2000:12). (2000). *Akuntabilitas dan Good Governance*. Modul Sosialisasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), 2.
- Lindquist, EA, & Huse, I. (2017). *Akuntabilitas dan pengawasan pemerintah di era digital*:
- Mamahit, AI, & Urumsah, D. (2018). *Model Komprehensif Whistle-Blowing, Audit Forensik, Investigasi Audit, dan Deteksi Penipuan*. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Strategis*. <https://doi.org/10.33005/jasf.v1i2.43>

- Martins, OS, & Junior, RV (2020). Pengaruh corporate governance terhadap mitigasi kecurangan pelaporan keuangan. *Revista Brasileira de Gestao de Negocios*, 22(1), 65–84. <https://doi.org/10.7819/rbgn.v22i1.4039>
- Martins, OS, Júnior, RV, Chowdhury, A., Chandra, N., Sadaf, R., Oláh, J., Popp, J., Máté, D., Ali, T., Jhandhir, Z., Ahmad, A., Khan, M., Khan, AA, Choi, GS, Vian, T., Suryanto, T., Daliri, S., Kartini, Yulistyawati, NKA, ... Wu, T.-C. (2020).
- McNabb, DE (2017). Wajah Baru Pemerintah: Bagaimana Manajer Publik Menempa Pendekatan Baru untuk Pemerintahan. *Wajah Baru Pemerintah: Bagaimana Manajer Publik Menempa Pendekatan Baru untuk Pemerintahan*, 1–280. <https://doi.org/10.4324/9781315085708>
- Messier, W. (2017). Layanan Audit dan Penjaminan: Pendekatan Sistematis (Buku). Dalam *Masalah di Pendidikan Akuntansi (Masalah 3)*.
- Natoen, A., Dewata, E., Satriawan, I., Ardiani, S., & Ar, S. (2018). Penentu Kualitas Hasil Kerja Pengawas Intern Pemerintah (Studi Kasus Pada Pemerintah Daerah Indonesia). 8(2), 18–28.
- Pollitt, C., & Bouchaert, G. (2011). Reformasi Manajemen Publik (Edit Ketiga). Pers Universitas Oxford Inc. <http://eprints.uanl.mx/5481/1/1020149995.PDF>
- Ridha Albaar, M. (2020). Implementasi E-Government : Dalam Menciptakan Pemerintahan Baik Dan Bersih. CV. Sintaks Computama.
- Sadaf, R., Oláh, J., Popp, J., & Máté, D. (2018). Investigasi pengaruh tata kelola dan daya saing di seluruh dunia pada kasus penipuan akuntansi: Perspektif lintas negara. *Keberlanjutan (Swiss)*, 10(3), 1–12. <https://doi.org/10.3390/su10030588>
- Sandoval-Almazán, R., Luna-Reyes, LF, Luna-Reyes, DE, Gil-Garcia, JR, Puron-Cid, G., & Picazo-Vela, S. (2017). Membangun Strategi Pemerintahan Digital: Prinsip dan Praktik. Dalam *Administrasi Publik dan Teknologi Informasi (Vol. 16)*. https://doi.org/10.1007/978-3-319-60348-3_3
- Schuchter, A., & Levi, M. (2016). Segitiga Penipuan ditinjau kembali. *Jurnal Keamanan*, 29(2), 107–121. <https://doi.org/10.1057/sj.2013.1>
- Sekaran, U., & Bougie. (2019a). Metode Penelitian untuk Bisnis Pendekatan Pengembangan Keahlian. Dalam *Edisi 6 Buku 1 (Edisi 6, hlm. 1–280)*. Salemba Empat.
- Sekaran, U., & Bougie, R. (2019b). Metode Penelitian untuk Bisnis Pendekatan Pengembangan Keahlian. Dalam *Edisi 6 Buku 2 (edisi ke-6, hlm. 1–262)*. Salemba Empat.
- Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D (Sutopo (ed.); Cetakan Ke).* ALFABETA.
- Sujarweni, VW (2015). *Akuntansi Desa: Panduan Tata Kelola Keuangan Desa*. Yogyakarta: Pustaka Baru Tekan.
- Suryanto, T. (2016). Kebijakan dividen, teknologi informasi, pelaporan akuntansi hingga reaksi investor dan pencegahan penipuan. *Jurnal Internasional Perspektif Ekonomi*, 10(1), 138–150.
- Taylor, MM (2018). Mendapatkan akuntabilitas: Sebuah kerangka kerja untuk perencanaan & pelaksanaan strategi antikorupsi. *Daedalus*, 147(3), 63–82. https://doi.org/10.1162/DAED_a_00503
- Tseng, T.-Y., & Wu, T.-C. (2016). Pengaruh Tata Kelola Perusahaan terhadap Hubungan antara Korupsi dan Pertumbuhan Ekonomi Negara Maju versus Negara Berkembang. *Jurnal Riset Internasional Keuangan Terapan Jurnal Riset Internasional Keuangan Terapan Jurnal Riset Internasional Keuangan Terapan* ISSN, VII, 2229–6891. <https://doi.org/10.0707/article-10.0707/article>
- Utami, W., Nugroho, L., Mappanyuki, R., & Yelvionita, V. (2020). Determinan peringatan dini penipuan dalam industri perbankan. *Tinjauan Ekonomi dan Keuangan Asia*, 10(6), 604–627. <https://doi.org/10.18488/journal.aefr.2020.106.604.627>
- Utami, W., Oktris, L., Rini, R., & Yulianti, NW (2021). *Praktik Tata Kelola Perusahaan dan*

- Pengungkapan Manajemen Risiko Bank Syariah di Asean. *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah*, 13(1), 121–136. <https://doi.org/10.15408/aiq.v13i1.19712>
- Vamela, D., & Setiyawati, H. (2021). Analisis Keefektifan Sistem Pengendalian Intern dan Moralitas Manajemen Terhadap Kecenderungan Fraud Dalam Akuntansi. *Prosiding 1st MICOSS Mercu Buana International Conference on Social Sciences, MICOSS 2020*, 28-29 September 2020, Jakarta, Indonesia. <https://doi.org/10.4108/eai.28-9-2020.2307366>
- Vian, T. (2020). Anti-korupsi, transparansi dan akuntabilitas dalam kesehatan: konsep, kerangka kerja, dan pendekatan. *Aksi Kesehatan Global*, 13(sup1). <https://doi.org/10.1080/16549716.2019.1694744>
- Yulistyawati, NKA, Suardikha, IMS, & Sudana, IP (2019). Analisis faktor penyebab kecurangan pelaporan keuangan dengan fraud diamond. *Jurnal Akuntansi & Auditing Indonesia*, 23(1), 1–10. <https://doi.org/10.20885/jaai.vol23.iss1.art1>
- Zamzami, F., Faiz, IA, & Mukhlis. (2015). *Audit Internal Konsep dan Praktik*. Pada Juli 2015.
- Zhou, D.-X. (2019). Analisis Peningkatan Sistem Akuntabilitas Pemerintahan pada Gedung Pemerintahan Berorientasi Pelayanan Era Baru. *84(Msmi)*, 64–68. <https://doi.org/10.2991/msmi-19.2019.12>